



## Legislatif Desak Pemkot Yogya Punya Solusi Konkret Atasi Sampah

**YOGYA, TRIBUN** - Kalangan legislatif mendesak Pemkot Yogyakarta supaya segera mencarikan solusi konkret untuk mengatasi problem persampahan. Rentetan operasi yustisi yang berujung sanksi tindak pidana ringan (tipiring) berupa denda dianggap bukan solusi tepat dalam mengatasi situasi darurat ini.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya, Krisnadi Setyawan, mengatakan, bagaimanapun masyarakat sudah menjalankan kewajiban, meski haknya terkait persampahan belakangan semakin berkurang.

Bagaimana tidak, pengurangan volume limbah harian di tengah situasi darurat ini tidak lepas dari

peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat, dalam mengelola dan mengolah limbah rumah tangga. "Masyarakat sudah melakukan sesuatu yang lebih. Pengelolaan dan pengolahan sudah melebihi hak yang harusnya didapat," ujarnya di sela diskusi DPRD Kota Yogyakarta Menyapa, Jumat (29/9).

"Ya, hak yang harusnya didapat warga terkait limbah, kan, lebih dari itu. Sekarang pelayanannya menurun, tapi masih ditarik retribusi," imbuh Krisnadi.

Ia pun menjelaskan, harus diakui, ketidakberesan pengelolaan limbah di Di Yogyakarta ini berawal dari permasalahan besar di TPA Piyungan, Bantul. "Sehingga,

Pak Gubernur ngendika sampah harus selesai di kabupaten dan kota. Nah, yang berat tentu Kota Yogya, karena tidak punya lahan," urainya.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Cholik Nugroho Adji, menambahkan, keterbatasan lahan itu menyebabkan banyak limbah bercecer di jalan. Menurutnya, hal-hal kecil semacam itu berpotensi menjadi sebuah konflik sosial berkepanjangan yang sulit terurai antar warga masyarakat di wilayah.

"Kami coba memberi perhatian besar. Dianggarkan (TPST mandiri), namun itu jangan sampai memotong anggaran pelayanan masyarakat," tandasnya.

Menurutnya, gerakan Mbah Dirjo (Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori ala Jogja) memang bisa dan terbukti berhasil menekan volume sampah. Hanya saja, ia menyebut, gerakan tersebut tak bisa terus-menerus diandalkan, mengingat banyak sekali keterbatasan dan butuh anggaran tidak sedikit.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya, Ahmad Mufaris, menandaskan, kondisi saat ini seperti masyarakat dibenturkan dengan keadaan pelik. Dengan fasilitas sarana prasarana pembuangan yang relatif kurang memadai, penduduk masih terancam tipiring saat kedapatan membuang sembar-



**DISKUSI** - Komisi D DPRD Kota Yogya tengah berdiskusi mengenai sampah di wilayah ini di sela diskusi DPRD Kota Yogyakarta Menyapa, Jumat (29/9).

rangan. "Mbook diganti hukuman sosial. Sanksi denda itu, kan, warga aier-

gi. Jangan dibenturkan keadaan, mereka buang di jalan karena terpaksa," ujarnya. **(aka/ord)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005